

# MODEL IDEAL SUKSESI KEPEMIMPINAN DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

<sup>1</sup>M.Junaidi, S.Ag., M.H., <sup>2</sup>Diana Setiawati, L.LM.,

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: <sup>1</sup>mj122@ums.ac.id, <sup>2</sup>Ds170@ums.ac.id

## Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui model ideal suksesi kepemimpinan nasional dalam demokrasi di Indonesia. Hal didasarkan bahwasanya Kontinuitas atau suksesi dalam kepemimpinan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, karena suksesi tersebut akan menentukan keberlangsungan hidup mereka, Dari banyaknya kasus hukum yang menjerat para pemimpin dalam pemerintahan negara Indonesia, serta didapatinya pemimpin yang tidak kompeten dan hanya bermodalkan relasi dan uang saja, dapat disadari bahwa ternyata Indonesia secara keseluruhan belum dapat mempersiapkan penerus melalui perencanaan suksesi untuk memimpin atau mewakili rakyat, Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan suksesi kepemimpinan yang ada dan dibutuhkan di Indonesia. Dimulai dari berbagai kelemahan dan persoalan muncul dalam sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia saat ini, mulai dari partisipasi politik berbiaya tinggi hingga lemahnya sistem kaderisasi kepemimpinan, Penelitian ini dilakukan dengan studi menggunakan metode kajian pustaka dengan fokus pembahasan pada pemahaman mengenai suksesi secara keseluruhan, Pandangan islam dalam kepemimpinan, pemilihan pemimpin dengan mengembalikan prinsip musyawarah mufakat sebagai ciri demokrasi pancasila; dan berlangsungnya kaderisasi para pemimpin,

**Kata Kunci:** Suksesi Kepemimpinan, Kepemimpinan Nasional, Sistem Pemilihan.

## 1. PENDAHULUAN

Munculnya seorang pemimpin dapat dipahami sebagai suatu akibat norma sosial sebagai suatu kebutuhan dan consensus atau kesepakatan bersama dalam masyarakat tersebut, Pendalaman consensus ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem dimana bagian-bagiannya saling berhubungan satu sama lain, Interaksi sosial yang tercipta pada dasarnya selalu menuju kepada terjadinya integrasi dan keseimbangan sosial yang dinamis, Dalam Integrasi sistem sosial inilah consensus dalam masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu menjadi salah satu faktor penting yang ada didalamnya. Disinilah pemimpin dipahami sebagai simbol untuk menjaga suatu tatanan sistem sosial dan tata tertib atas dasar norma sosial yang ada.

Berbeda dengan pendekatan consensus, pendekatan coercion atau dominasi memahami bahwa masyarakat selalu mengandung konflik. Konflik itu merupakan suatu gejala terjadinya potensi disintegrasikan perubahan sosial dalam masyarakat, yang oleh karena itu masyarakat hanya dapat terintegrasi melalui suatu dominasi atau coercion oleh kelompok sosial lainnya, Dahrendorf menggambarkan sistem seperti ini dengan istilah ICAS (Imperatively Coordinated Mssociations), dari pendekatan coercion ini dapat dikatakan bahwa dengan demikian bangunan sistem sosial akan dapat terintegrasi dengan sebenar-benarnya atas dominasi sekelompok orang terhadap masyarakat, Ini berarti dalam proses integrasi tersebut terjadi hubungan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas melalui coercion atau dominasi, dimana mereka yang mempunyai otoritas akan menguasai kelompok yang tidak mempunyai otoritas.

Dari pendekatan coercion muncul anggapan bahwa pemimpin merupakan simbol kekuatan yang memaksa, mereka tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Dengan kata lain pemimpin bukan hasil dari consensus atau kesepakatan bersama, akan tetapi lebih merupakan suatu unsur dominasi atas pemimpin masyarakat.

Menurut pendekatan behavioral atau tingkah laku, faktor-faktor psikologislah yang membuat seorang pemimpin bisa muncul. Bagi pendekatan ini terjadi interaksi antara tiga komponen, yaitu faktor lingkungan, predisposisi dan political response, Faktor lingkungan ini meliputi, lingkungan sosial, politik dan ekonomi, Lingkungan merupakan kumpulan variabel yang mempengaruhi muncul atau terbentuknya sikap seseorang. Karena itu lingkungan tidak saja yang melingkupi seseorang, akan tetapi yang lebih penting kemudian adalah lingkungan sebagaimana ditafsirkan oleh seseorang tersebut, Faktor lingkungan ini akhirnya membentuk predisposisi seseorang, yaitu suatu kecenderungan psikis yang sudah siap untuk memberikan reaksi secara psikologis, bergantung pada stimulus yang diberikan, Dan akhirnya dari kedua faktor itu memunculkan political response dari seseorang untuk bertindak menjadi aktor politik tertentu.

Bagi penganut Marxisme konservatif, mereka tidak percaya kepada peranan dan eksistensi pemimpin, Mereka juga tidak percaya faktor psikologis begitu berperan, karena mereka menganggap bahwa dalam masyarakat selalu terjadi konflik antar kelas, Lantaran selama masih terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat maka selama itu pula akan terjadi konflik kelas dalam masyarakat, kaarena itu bagi pendekatan marxisme konservatif yang menganggap esensial di dalam masyarakatnya adalah adanya konflik kelas, Pemimpin merupakan akibat dari konflik kelas dari masyarakat, Struktur sosial dan ekonomi sudah berjalan sedemikian rupa sehingga munculnya pemimpin merupakan bagian dari arus umum besar sejarah (part of the general course of development), hal ini dikatakan Ralp Milinband sebagai trans generational history, yaitu suatu proses sejarah yang menganggap individu tidak terlalu menjadi bagian penting untuk memainkan peran menentukan.

Di dalam teori soCial movement, Niel Smellser mengungkapkan pentingnya pemimpin dalam memobilisir suatu gerakan sosial dan politik, Tanpa unsur pemimpin niscaya Gerakan sosial tidak akan muncul kepermukaan, apalagi untuk berhasil mencapai tujuan. (Mark N.Hagopian, 1978), Senada dengan Niel Smellser adalah Erick Hotffer dan Gustave Le Bon yang menganggap pentingnya pemimpin dalam melahirkan dan menentukan keberhasilan suatu gerakan sosial dan politik (Mark N.Hagopian, 1976).

Pemimpin atau penguasa ketika memegang kekuasaannya cenderung mengeksploitasi kehidupan masyarakat sehingga menguntungkan kepentingannya. Tidak itu saja, bahkan penguasa sering kali mampu mengembangkan apa yang disebut Gaetano Mosta sebagai suatu politikal formula atau Pareto yang menyebutnya sebagai derivitionso politics, yaitu basis moral dan hukum bagi keberadaan para elit dalam banteng kekuasaannya. Untuk menginterograsi aspirasi masyarakat dengan elit maka perlu suatu "instrumen kohesi moral", Tanpa instrument itu eksistensi elit akan cenderung dipersoalkan oleh masyarakat,

Dengan demikian ketika pemimpin berkuasa cenderung mensosialisasikan dan memaksakan kepentingannya kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol publik. Bahkan pemimpin, kalau dipahami dengan pendekatan coercion, berusaha menggunakan kekuasaannya sebagai instrument untuk memenuhi kepentingannya.

Ralp Milinband menguatkan pendapat di atas, yaitu adanya usaha dari penguasa. pemimpin untuk mempertahankan kekuasaannya dan membenarkan tindakannya dengan cara process of messive indoctrination, Penguasa atau pemimpin merupakan lembaga fungsional dari negara yang berusaha memobilisasi ideologi untuk membenarkan tindakannya dalam masyarakat, Menurut Allhusser secara inslitusional ada dua institusi yang terlibat dalam memobilisasi ideologi, yaitu pertama Repressive State Apparetus (RSA) dan kedua ldiological State Apparatus (ISA), Lembaga yang pertama berperan untuk memelihara kekuasaan negara melalui kekuatan fisik, seperti polisi dan militer, Lembaga yang kedua merupakan lembaga

yang berperan membenarkan keabsahan penguasa melalui penyebaran ideologi negara, Kalau negara dipertahankan melalui RSA berarti negara itu dipertahankan secara direct domination sedangkan jika negara dipertahankan melalui ideologi maka disebut indirect domination (Allan Swingewood, 1977).

Kesimpulan teoritisnya adalah, pola kepemimpinan yang kompleks dan berjenjang, yang kehadiran pemimpinnya mungkin sebagai simbol eksploitasi antara mereka yang memimpin dan yang dipimpin atau bahkan merupakan konsensus diantara masyarakat tersebut untuk mengukuhkan sistem sosial dengan cara memunculkan pemimpin yang mereka kehendaki, dan pemimpin ketika mereka berkuasa selalu berusaha mempertahankan legitimasi kekuasaannya, baik melalui lembaga ideologi maupun lembaga militer, Mereka selalu menciptakan formula politik atau mengusahakan tercapainya hegemoni negara dengan cara mempertahankan ideologi.

Kepemimpinan inilah yang nantinya akan menentukan kemajuan dan langkah bangsa atau negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan, Maka dari itu dibutuhkanlah suatu pembentukan maupun pengawasan terhadap calon-calon pemimpin, baik dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah itu sendiri, proses inilah yang kerap disebut sebagai suatu suksesi kepemimpinan, dan suksesi kepemimpinan inilah yang menjadi hal vital bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Atas dasar di atas, penulis ingin meneliti pemimpin ideal di Indonesia serta model ideal dalam suksesi kepemimpinan nasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang berhubungan dengan model ideal suksesi kepemimpinan di Indonesia. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011, hlm. 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang, Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penggabungan dan analisis data yang bersifat induktif (Sugiono. 2010: 9). Menurut Poerwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Sedangkan Djam'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya,

Dilihat dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode kualitatif deskriptif merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mendapatkan data yang menyajikan data apa adanya tanpa manipulatif yang hasilnya menekankan pada maknanya atau pemaknaannya. Penyusunan makalah ini dilakukan dengan mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan dan dilakukan beberapa perbaikan dalam sistematika penulisan yang disertai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait sehingga makalah tersebut dapat tersaji secara runtut dan mudah dipahami.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan, dalam pengertian lain kepemimpinan adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

Hampir setiap literatur-literatur tentang kepemimpinan memberikan gambaran yang ideal tentang kepemimpinan, hal ini dapat dimengerti, karena manusia membutuhkan kepemimpinan itu, dan dari waktu ke waktu kepemimpinan menjadi tumpuan harapan dari manusia, sehingga dewasa ini masalah kepemimpinan semakin menarik perhatian banyak kalangan terutama dalam kajian komtemporer, sebab kepemimpinan memiliki dimensi yang luas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah perihal memimpin atau cara memimpin, kepemimpinan bisa dirumuskan sebagai kiat mempengaruhi orang banyak agar mau bekerjasama memperjuangkan tujuan-tujuan yang ingin mereka capai, kemudian beberapa para ahli pun juga mengutarakan pendapatnya tentang pengertian kepemimpinan, yang antara lain:

- 1) Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu (Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961, 24).
- 2) Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Shared Goal, Hemhiel & Coons, 1957, 7).
- 3) Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama (Rauch & Behling, 1984, 46).
- 4) Kepemimpinan adalah kemampuan seni atau tehnik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya.
- 5) Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan (Jacobs & Jacques, 1990, 281).
- 6) Kepemimpinan adalah seni dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (John Piffner).
- 7) Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Slamet, 2002: 29)
- 8) Kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 1983:123)
- 9) Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan (Robbins, 2002:163).
- 10) Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa (Ngalim Purwanto 1991:26).

Jadi, berdasarkan berbagai pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa definisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk meneapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi.

Idealnya seorang pemimpin itu memegang kekuasaan sesuai dengan bidang dan keahlian dan bakatnya. Sebab tanpa hal tersebut, seorang pemimpin akan menemui kesulitan dalam melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri, kesulitan mawas diri dan kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga secara rasional pemimpin dituntut kepandaiannya untuk memimpin jalannya perkumpulan yang berada dalam wewenangnyanya sesuai dengan misi perkumpulan itu dibentuk secara bersama, misalnya sebuah negara yang dipimpin oleh kepala negara.

Pemimpin adalah inti dari suatu organ. Ini berarti bahwa organ tersebut akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin, kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin, seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya, seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama, dalam melaksanakan kepemimpinan, pemimpin memiliki berbagai tugas utama, yang menurut James A.F Stonen, tugas utama tersebut meliputi:

- 1) Pemimpin bekerja dengan orang lain.  
Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- 2) Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akontabilitas).  
Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik, pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan bawahannya tanpa kegagalan.
- 3) Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas  
Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas, dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada bawahan, kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara efektif.
- 4) Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual  
Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. yang selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat, serta pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.
- 5) Manajer adalah seorang mediator  
Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).
- 6) Pemimpin adalah politisi dan diplomat  
Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi, sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.

Kemudian menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah:

- 1) Peran hubungan antar perorangan, fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi.
- 2) Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.
- 3) Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

Dalam suatu kepemimpinan, islam pun juga menyadari bahwa akan sulit menerima apabila ada sekelompok masyarakat hidup tanpa seorang pemimpin, yang dari itu Nabi Muhammad SAW berpesan “apabila kalian bertiga atau lebih dalam suatu perjalanan, maka angkatlah salah seorang diantara kalian sebagai pemimpinnya”, yang dari pesannya tersebut, menunjukkan signifikansi seorang pemimpin dalam masyarakat.

Secara normatif, al-Qur’an menggunakan tiga term yang menunjukkan makna kepemimpinan.

- 1) Khilafah

Khilāfah adalah sebuah sistem kepemimpinan yang pernah dirumuskan dan diaplikasikan pada masa islam klasik. Para ulama masa lalu telah mencoba memahami dan memformulasikan konsep khilafah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an tentang kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan berbangsa,

- 2) Wilayah

Wilayah artinya kepemimpinan. Orang yang memimpin disebut wali. Secara umum pemimpin umat adalah Allah Ta’ala, Rasulullah saw dan orang-orang beriman.

- 3) Imamah

Imamah adalah sistem kepemimpinan dan orang yang memimpin disebut imam. Imamah adalah kepemimpinan yang bersifat umum, baik kepemimpinan negara atau kepemimpinan “ibadah mahdah” seperti shalat. Pemimpin dalam ruang lingkup orang-orang yang bertakwa adalah “imām li al-muttaqīn” atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa

Pemimpin dalam islam adalah orang yang paling berkualitas diantara anggota komunitas. Allah Ta’ala Maha Tahu siapa diantara umatnya yang paling berkualitas hingga diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah “Al-Musthaf” atau orang pilihan yang dipilih dan diangkat oleh Allah SWT, lalu pemimpin yang bukan nabi dan rasul dipilih dan diangkat oleh orang-orang diantara mereka.

Al-Qur’an mengisyaratkan umat islam memilih pemimpin dengan “khairu ummat” yaitu umat terbaik yang memiliki syarat:

- 1) Adil
- 2) Berilmu pengetahuan yang luas
- 3) Sehat indrawi seperti sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan.
- 4) Sehat anggota tubuh dari kekurangan yang menghalanginya melakukan aktivitas.
- 5) Memiliki pemikiran yang cerdas dalam menyikapi perkembangan politik dan kemaslahatan umat.
- 6) Berani dalam menegakkan kebenaran.

### 3.2. Kepemimpinan di Indonesia

Sejak orde lama hingga orde baru, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan, Suksesi kekuasaan di Indonesia ada yang melalui proses pemilihan umum, namun

ada pula yang melalui proses penyerahan kekuasaan dalam situasi yang penuh ketegangan politik, Peristiwa G30s menjadi titik awal terkikisnya kekuasaan Soekarno dari panggung politik, Presiden Soekarno akhirnya benar-benar jatuh pada 1966 dengan penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar/SP 11 Maret) 1966 kepada Soeharto.

Supersemar sebenarnya bukanlah transfer kekuasaan dari presiden Soekarno kepada Soeharto, melainkan perintah untuk pengamanan kekuasaan, penyerahan Supersemar ditafsirkan sebagai kudeta merangkak, Proses kudetanya tidak langsung menjatuhkan, melainkan secara perlahan-lahan, Bahkan setelah kekuasaan beralih, Soekarno masih berstatus sebagai presiden, Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto, Yang dimana sejak saat itulah, Soeharto tampil sebagai pemimpin baru yang mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan-tindakan politis untuk mengikis kekuasaan Soekarno.

Tindakan-tindakan politis dan langkah-langkah kekuasaan Soeharto masa dualism iniberujung pada tanggal 12 Maret 1967, Dimana sidang MPRS mencabut kekuasaan Soekarno dari kursi kepresidenan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden, Sejak saat itulah muncul orde baru yang akan berkuasa hingga 32 tahun kedepan, dan dikurun waktu yang tersebutlah terjadi berbagai ketidakseimbangan kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia.

Soeharto di awal kekuasaannya menggunakan strategi “reformasi nanti”, yaitu melakukan reformasi politik secara bertahap, kompromi dengan mempengaruhi para pemimpin oligarki partai, dan penekanan dwi fungsi ABRI pada kekaryaan dalam urusan non militer (Mohtar Mas’oed, 1989), Kemudian dalam pemilu 1971 dengan kemenangan partainya, yaitu Golkar secara telak, maka pada tahun 1973 parpol “dipaksa” untuk melakukan fusi menjadi tiga, yang terdiri dari Golkar, PPP dan PDI, Dengan suara telak yang ada pada partai Golkar serta Soeharto sebagai Presiden, sejak saat itulah parpol, khususnya PPP dan PDI seakan hanya menjadi partai penggembira saja dan sebagai pelengkap partai politik di Indonesia karena ditahun-tahun mendatang Golkar selalu menjadi pemenang pemilu.

Menanggapi kekuasaan otoriter Soeharto itu, muncullah suatu gerakan yang didasarkan atas tuntutan rakyat kepada pemerintah yang secara umum di latar belakang oleh penyelewengan dan perlakuan tidak adil di berbagai bidang, seperti politik, hukum, dan ekonomi, Di mana di semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Gerakan inilah yang kemudian dinamakan dengan gerakan reformasi,

Gerakan reformasi ini kemudian menciptakan suatu masa reformasi atau masa transisi yang kemudian membuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi, Masa ini dimulai dari puncak Gerakan reformasi dimana pemimpin BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Pada masa transisi ini, Habibie kemudian membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan yang ada.

Sistem yang dijalankan oleh Habibie lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan, dan kemudian di masa ini pula, partai politik menjadi independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer, Selain itu Habibie juga menerapkan pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan, Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR, Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan

nasional, demokrasi inilah yang menjadi suatu proses suksesi kepemimpinan hingga saat ini menemani pemilihan umum.

### 3.3. Upaya Suksesi

Dalam suksesi suatu kepemimpinan, di Indonesia terjadi berbagai upaya untuk melakukannya, upaya-upaya ini diantaranya:

a. Pembentukan Karakter.

Pembentukan karakter seseorang dimulai sejak dini, yang pembentukannya dapat terjadi dan tumbuh dari berbagai tempat dan berbagai hal, pertumbuhan karakter ini dapat terjadi baik di sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar.

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk pembentukan karakteristik seseorang. Sebagai contoh, Pendidikan karakter seorang pemimpin di sekolah pada tingkat sekolah menengah atas dapat dilakukan dengan hal pembiasaan dan dimulai dari hal yang sederhana seperti aktif mengikuti organisasi, menjadi ketua kelas, jujur, sopan dan santun, serta selalu taat pada peraturan dan tata tertib yang ada.

Dalam hal kaitannya dengan proses suksesi kepemimpinan yang dimana tidak bisa lepas dari karakter yang luhur dalam diri seorang pemimpin, komponen yang ada di sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memantau dan mengarahkan peserta didik agar menjadi pribadi yang bijak, jujur, kritis, serta bertanggung jawab, Karena bila mana seseorang tidak dapat menguasai hal-hal tersebut, Maka akan berdampak kurang baik dalam pengembangan karakter pada peserta didik yang diharapkan dapat menjadi pemimpin di masa depan.

Pembentukan watak dan pendidikan karakter tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, akan tetapi seluruh pihak atau komponen yang ada disekitar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar dan bahkan secara keseluruhan juga harus ikut aktif dalam membentuk karakter seseorang, Dalam keluarga seseorang akan dilatih untuk disiplin, bertanggung jawab, taat, dan jujur kepada apa yang di tetapkan dan diharuskan dalam keluarga mereka, Bahkan dalam keluarga, seseorang juga dapat terlatih kemampuan berdemokrasi dan berpolitik mereka melalui adanya musyawarah keluarga, Begitupun juga di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar mereka, yang dengan ditanamkannya karakter diri yang luhur, seseorang tersebut diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin ideal dimasa depan nantinya.

b. Kaderisasi salam Partai Politik.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan merupakan suatu keharusan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam organisasi, Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dapat dimulai dari rekrutmen dan kaderisasi yang baik, Untuk lingkup kepemimpinan nasional, mekanisme kaderisasi dalam suatu partai politik sangat penting, sebab dalam era demokrasi saat ini, partai politik menjadi salah satu pilar utama karena peranannya yang sangat penting, seperti dalam proses seleksi kepemimpinan nasional dan pengisian jabatan publik. Namun kenyataannya, mayoritas partai yang berdiri saat ini belum mampu memaksimalkan mekanisme kaderisasi ataupun pola rekrutmen yang semestinya sehingga kerap kali terjadi politik kekerabatan.

Selain itu, partai politik sering memotong mata rantai kaderisasi dengan mengutamakan calon Pilkada, Pilgub maupun Pileg dari kalangan artis yang rekrut secara instan karena faktor popularitas dengan harapan dapat mendulang suara untuk kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya, banyak kader partai yang menjadi pemimpin

nasional tidak mampu memikul tugas dan tanggungjawab yang diberikan, dan seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya.

Yang maka dari itu, Partai harus menciptakan pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup dibentuk dan diadanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus, kemudian mengambil suatu model rekrutmen yang terbuka dan demokratis serta menerapkan sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan, lalu partai juga haruslah membentuk suatu jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi.

Selain langkah tersebut, Partai politik juga perlu untuk menerapkan affirmative action dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik. Selain itu kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partapo politik, parlemen dan jabatan publik lainnya; yang model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Pemilihan Umum (Pemilu).

Puncak dari suatu suksesi yaitu adalah pemilihan seorang pemimpin, Yang maka dari itu, Pemerintah telah menerapkan pemilihan umum untuk rakyat memilih orang-orang untuk mengisi atau menempati jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung.

Ada enam asas pemilu di Indonesia, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk mewujudkan demokrasi, demi terciptanya tujuan pemilu yang demikian, tentunya diperlukan suatu kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suaranya, dan demi terwujudnya pemilu yang tertib dan adil, maka pemerintah telah menetapkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dengan bantuan lembaga dan badan di bawahnya,

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kepemimpinan akan menentukan kemajuan dan langkah suatu bangsa atau negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan, Kepemimpinan yang baik tentunya harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik dan layak pula, Maka dari itu dibutuhkanlah suatu suksesi kepemimpinan, Suksesi kepemimpinan ini sendiri, tepatnya di Indonesia, tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan sesuai dengan UUD 1945, suksesi tersebut dapat ditempuh dari berbagai upaya seperti pembentukan karakter kepemimpinan seseorang sejak dini, kemudian pengkaderan yang sehat oleh partai politik, yang pada akhirnya dipuncaki oleh bentuk nyata demokrasi terhadap kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum, yang peran aktif pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh sangat diperlukan demi terpilihnya seorang pemimpin yang ideal dalam kepemimpinan yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia.

Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia haruslah terus berusaha dalam membentuk karakter dan mempercerdas diri dengan ilmu dan pengalaman, serta ikut berperan aktif dalam politik yang sehan dan ikut serta menggunakan hak suara kita dalam pemilu, yang dimana tindakan-tindakan tersebut dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur serta dapat mencapai cita-cita yang didamba-dambakan.

## REFERENSI

- Supriyadi, Bambang. (1997), "Suksesi Kepemimpinan di Indonesia" Jurnal Perspektif Volume.2, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Surabaya.
- Daswati. (2012), "Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gyaa Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi" Jurnal Academica Fisip Untad, Palu.
- Tjiang, Canice Gerry Hermawan. (2014), "Studi Deskriptif Perencanaan Suksesi Kepemimpinan pada Perusahaan Keluarga di Bidang Konstruksi Sidoarjo" AGORA Vol.2, Srabaya.
- Harahap, Insan Harapan. (2017), Kaderisasi Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kpeemimpinan Nasional, Universitas Bakrie, Jakarta.
- Nugroho, Puji. (2020), Peran Sekolah Dalam Pembentukan Pendidikan Karakter pada Era Revolusi Industri 4.0, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang.
- Haris, Syamsuddin dkk. (2016), Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Jurdi, Fajlurrahma. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana
- Tri, Widodo. (2012). Dukungan Amerika Serikat Terhadap Karir Politik Soeharto, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.